

**PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA
WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO**

Mutmainnah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Email: mutmainnah735@gmail.com

IBK.Bayangkara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Email: bayibeka@gmail.com

ABSTRACT

Village financial management is the activity of managing village finances for the better. Village financial management is based on regulations and the ability of human resources to manage. According to the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 explains that village financial management is a whole activity including the Planning stage, Implementation stage, Administration stage and Accountability stage. This study aims to find out how the financial management of the Village Fund in Wonoplintahan Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. The results show that in the planning stage, implementation stage, administration stage and accountability stage in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. In the accountability reporting stage, it has been easier to make reports because they have used the SISKEUDES application. As for the obstacles experienced by the community's misunderstanding of information in the open era, which is easy for them to get, but they do not understand the flow of Village Financial Management and the existence of various unexpected conditions such as weather conditions which become obstacles in road construction activities so that it is not timely in completion.

Keywords : Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Accountability

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan serta kemampuan sumber daya manusia yang mengelola. Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan, tahap Penatausahaan dan tahap Pertanggungjawaban. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, apakah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan, tahap Penatausahaan dan tahap Pertanggungjawaban sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam tahap Pelaporan Pertanggungjawaban sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan dikarenakan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Adapun kendala yang dialami kesalahan fahaman masyarakat atas informasi di era terbuka yang mudah mereka dapatkan namun kurang memahami alur Pengelolaan Keuangan Desa dan adanya berbagai kondisi yang tidak terduga seperti kondisi cuaca yang menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan jalan sehingga kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintah Desa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan desa agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa dengan tertib dan disiplin. Masyarakat membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Maka dari itu pengelolaan keuangan desa tersebut diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memilih objek penelitian di Wonoprintahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perencanaan keuangan desa di Desa Wonoprintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas

jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal pasal yang mengukur Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan pada Pasal 20 – Pasal 23, Pelaksanaan pada Pasal 24 – Pasal 34, Penatausahaan pada Pasal 35 - Pasal 36, Pelaporan pada Pasal 37 dan Pertanggungjawaban pada Pasal 38 – Pasal 43.

4. Desa

Menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul Pemerintah Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa adalah daerah yang

memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan konsep otonomi daerah, termasuk yang terkait dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa selalu memperhatikan dan membangun desa melalui otonomi pemerintah desa serta peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

5. *Pemerintah Desa*

Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. *Struktur Organisasi Pemerintah Desa*

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dengan demikian, dalam pelaksanaannya sebagian kekuasaan dilimpahkan kepada penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bersama kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris desa
- c. Kepala seksi
- d. Bendahara Desa

7. *Pengelolaan Keuangan Desa*

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan yang harus dipahami dan dilaksanakna sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa terkait dengan pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota, pokok bahasan pelaksanaan di desa, Struktur APBDesa dan laporannya. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan bekerja tanpa aturan

pemerintahan desa yang baik. Karena itu bahwa, partisipasi pihak luar pemerintah desa dan instansi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti kepala desa, tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan dari petani, wakil rakyat miskin dan orang lain yang perlu terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

8. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

- a. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- c. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan Studi Kasus. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon

Kabupaten Sidoarjo.

3. *Jenis dan Sumber Data*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif tentang objek penelitian yaitu laporan keuangan pemerintah desa yang diterima dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa data diperoleh langsung dari objek penelitian seperti mendapatkan laporan keuangan desa. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dari literatur-literatur dan buku-buku yang bersangkutan dengan APBDesa.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Teknik Observasi, adalah dengan melakukan kunjungan atau observasi langsung pada objek penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- b. Teknik wawancara, merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pemerintah desa mengenai data perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa yang ada sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- c. Teknik Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip berupa tulisan.

5. *Definisi Variabel dan Variabel Operasional*

Variabel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Laporan Keuangan Pemerintah Desa adalah sebuah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam bendahara desa rangka penatausahaan di dalam Pengelolaan keuangan desa.

Operasional dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa Wonoprintaha dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban yang menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. *Metode Analisis Data*

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggambarkan objek yang diteliti dan Laporan Keuangan Desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban APBDesa. Data ini dibandingkan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Wonoprintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wonoprintahan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Typologi wilayah Desa Wonoprintahan merupakan Dataran rendah dengan luas wilayah 199,9 km². Penduduk Desa Wonoprintahan 5838 jiwa. Kepala Desa Yaitub Joko Setyanggono, ST, Sekretaris Desa yaitu Nur Kasan. Desa Wonoprintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo pendapatan desa sebesar Rp 2.040.755.212 yang terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak & retribusi, bantuan keuangan dll . Maka dari itu memiliki kewajiban untuk mengelola Dana Desa (DD) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014. Hasil penelitian ini memuat temuan-temuan penelitian dapat berupa tabel, grafik atau bagan dalam rangka menjelaskan hasil penelitian secara verbal tanpa mengulangi secara naratif atas isi dari tabel, grafik atau bagan tersebut.

- Tahap Perencanaan

Hasil Penelitian pengelolaan keuangan desa wonoprintahan pada tahap perencanaan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa wonoprintahan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- Tahap Pelaksanaan

Hasil Penelitian tahap pelaksanaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa wonoplintahan Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu :

1. Tahap Pertama Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya

Berikut tabel rancangan anggaran biaya desa wonoplintahan tahun 2021 tata cara penyusunan RAB Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan; Sekertaris desa memverifikasi RAB; Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada kepala Desa; Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB).

Tabel Rancangan Anggaran Biaya Desa Wonoplintahan Tahun 2021

PEMERINTAH DESA WONOPINTAHAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021									
Bidang : 12 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Sub Bidang : 12.3 Sub Bidang Kegiatan		Kegiatan : 12.3.01 Penyelenggaraan Pevandu (On-Hin Tambahan, Kls Binas, Jamin, Teras)D		Volume/Keluaran : 12.3.01.01		Tercadanya Sarana Pevandu Balita / Lansia	
Kode	Uraian	Sorela			Mandi			Bersambah/ (Berkurang)	
		Volume	Haran Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Haran Satuan	Jumlah (Rp)		
S.	Bekas			39.980.000,00			42.682.500,00	2.682.500,00	
S.2.1.	01. Pembangunan Ruteng			4.700.000,00			4.700.000,00	0,00	
S.2.1.06.	01. Bekas Ruteng Perencanaan			0,00			4.700.000,00	4.700.000,00	
S.2.2.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS		0,00	1 La	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
S.2.2.01.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	1 La	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
S.2.2.05.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.06.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	60 Oras	45.000,00	20 Oras	40.000,00	40.000,00	-1.000,00	
S.2.2.07.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	1 La	3.000.000,00	0 La	0,00	0,00	-3.000.000,00	
S.2.2.08.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.09.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.10.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.11.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.12.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.13.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.14.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.15.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.16.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.17.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.18.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.19.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.20.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.21.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.22.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.23.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.24.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.25.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.26.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.27.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.28.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.29.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.30.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.31.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.32.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.33.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.34.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.35.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.36.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.37.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.38.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.39.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.40.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.41.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.42.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.43.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.44.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.45.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.46.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.47.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.48.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.49.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.50.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.51.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.52.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.53.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.54.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.55.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.56.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.57.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.58.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.59.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.60.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.61.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.62.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.63.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.64.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.65.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.66.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.67.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.68.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.69.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.70.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.71.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.72.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.73.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.74.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.75.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.76.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.77.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.78.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.79.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.80.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.81.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.82.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.83.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.84.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.85.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.86.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.87.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.88.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.89.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.90.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.91.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.92.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.93.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.94.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.95.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.96.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.97.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.98.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.99.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.100.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.101.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.102.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.103.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.104.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.105.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.106.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.107.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.108.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)	DDS	0 La	0,00	0 La	0,00	0,00	0,00	
S.2.2.109.	01. Bekas Ruteng Konsumsi (Gedung/Gesam)								

menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). tatacara penyusunan SPP : Berdasarkan RAB, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi; Sekretaris desa melakukan Verifikasi terhadap SPP; Kepala Seksi menyampaikan dokumentasi SPP yang telah diverifikasi kepada Kepala Desa; Kepala Desa menyetujui SPP dan pembayaran selanjutnya dilakukan.

Tabel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Wonoplintahan Tahun 2021

PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021							
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAAAN DESA						Nomor : 0337/SPP/02.2014/2021	
Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan							
Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insektif)							
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan							
Output/Keuaran : Tersedia Sarana Posyandu Balita/Lansia							
No.	Kode	Uraian	Pagu	Pencairan s.d	Permintaan	Jumlah Sampai	Sisa Dana
			Anggaran	Yang Lalu	Sekarang	Saat Ini	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan / Minum)	4.530.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	30.000,00
2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	5.760.000,00	800.000,00	6.560.000,00	11.835.000,00
4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota	2.467.500,00	2.647.500,00	0,00	2.647.000,00	0,00
5	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	16.790.000,00	16.770.000,00	0,00	16.770.000,00	20.000,00
Jumlah			42.662.500,00	25.177.500,00	5.600.000,00	30.777.500,00	11.885.000,00
Disehji untuk dibayarkan KEPALA DESA WONOPLINTAHAN			Telah dibayar lunas JR KEUANGAN DESA WONOPLINTAH		Telah dilakukan verifikasi SEKDES WONOPLINTAHAN		Pelaksana Kegiatan, HERMAWAN STYO ANGGONO
JOKO SETYANGGONO,ST			JUNAEDI, SH		NURKASAN		

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

3. Tahap Ketiga Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menimbulkan biaya pengeluaran kegiatan dengan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di desa. Buku kas pembantu desa wonoplintah tahun 2021 Buku Kas Pembantu kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakuakn oleh pelaksana kegiatan.

Tabel Buku Kas Pembantu Desa Wonoplintahan Tahun 2021

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON TAHUN ANGGARAN 2021								
1. Bidang		: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2. Sub Bidang		: 2.02. Sub Bidang Kesehatan						
3. Kegiatan		: 2.02.02. Pemeliharaan Posyandu (Mkn Tambahan, Kk Bumil, Lmis, Insentif						
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dana Kas (Rp)	Pengeluaran (Rp)		Pengambilan ke Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp)
					Belanja Brd dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-2021	0021 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	2.647.500,00	0,00	0,00	0,00	2.647.500,00
2	03-05-2021	0113 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	10.330.000,00	0,00	0,00	0,00	12.997.500,00
3	06-05-2021	0131 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	960.000,00	0,00	0,00	0,00	13.957.500,00
4	08-06-2021	164 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.157.500,00
5	02-08-2021	0215 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.757.500,00
6	14-10-2021	0285 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	19.477.500,00
7	19-11-2021	0330 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.977.500,00
8	21-11-2021	0337 SPP02.2014.2021	PENYELENGGARA POSYANDU	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.577.500,00
9	04-02-2021	00045 SPP02.2014.2021	Belanja Makanan Tambahan Balita	0,00	2.647.500,00	0,00	0,00	24.930.000,00
10	01-03-2021	00228 SPP02.2014.2021	Belanja Bantuan Transport Kader Posyandu Balita	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	28.670.000,00
11	01-05-2021	00229 SPP02.2014.2021	Belanja Makanan Perambah Gusi Balita	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	29.320.000,00
12	01-05-2021	00231 SPP02.2014.2021	Belanja Bantuan Transport Petugas	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	19.280.000,00
13	30-04-2021	00232 K.W.T02.2014.2021	Belanja Makanan Perambah Gusi	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	17.880.000,00
14	05-05-2021	00250 K.W.T02.2014.2021	Belanja Bantuan Transport Kader Posyandu Balita	0,00	750.000,00	0,00	0,00	17.130.000,00
15	05-05-2021	00251 K.W.T02.2014.2021	Belanja Bantuan Transport Petugas	0,00	210.000,00	0,00	0,00	16.920.000,00
16	04-06-2021	00306 K.W.T02.2014.2021	Belanja Barang Lunak Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.720.000,00
17	30-07-2021	00388 K.W.T02.2014.2021	Belanja Makanan Perambah Gusi Balita	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	11.720.000,00
18	30-07-2021	00389 K.W.T02.2014.2021	Belanja Makanan Perambah Gusi	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00
19	13-10-2021	00496 K.W.T02.2014.2021	Belanja Makanan Tambahan Balita	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
20	13-11-2021	00588 K.W.T02.2014.2021	Belanja Makanan Perambah Gusi	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
21	19-11-2021	00590 K.W.T02.2014.2021	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
22	19-11-2021	00581 K.W.T02.2014.2021	Belanja Honor Petugas	0,00	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23	22-11-2021	00582 K.W.T02.2014.2021	Belanja Honor Pelaksanaan Kegiatan	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				30.777.500,00	30.777.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran, dan Saldo Kas				30.777.500,00	30.777.500,00	0,00	0,00	0,00

USUN PLINTAHAN, 06 Desember 20
KEPALA DESA WONOPLINTAHAN

JOKO SETYANGGONO, ST

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- Tahap Penatausahaan

Hasil Penelitian penatausahaan pengelolaan keuangan desa wonoplintahan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta penutupan pembukuan setiap akhir bulan dengan tertib. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- Buku Kas Umum berikut tabel buku kas umum desa wonoplintahan 2021 yang berisikan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas, sebelum ditandatangani kepala desa wajib diperiksa dan diparaf oleh sekretaris desa.

Tabel Buku Kas Umum Desa Wonoplintahan Tahun 2021

BUKU KAS UMUM PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2021								
KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI		KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR		Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021				
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	01/01/2021		Saldo Sebelumnya	235.315.426,80	0,00		235.315.426,80	235.315.426,80
2	19/01/2021		Saldo Pembelian					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00006/KWT02.2014/2021	818.182,00	236.133.608,80
		7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	236.256.335,80
3	19/01/2021		Belanja Barang Konsumsi					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.273,00	0,00	00319/KWT02.2014/2021	39.273,00	236.295.608,80
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	196.364,00	0,00		196.364,00	236.491.972,80
4	19/01/2021		Sisa 2020					
			Kas di Bendahara	15.000.000,00	15.000.000,00			236.491.972,80
5	20/02/2021		PENANGANAN KEADAAN MENDESAK					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Testuga	0,00	3.000.000,00	0001/SPP02.2014/2021	3.000.000,00	233.491.972,80
6	20/01/2021		PENYELENGGARAAN INFORMASIPUBLIK DESA					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.512.500,00	0002/SPP02.2014/2021	2.512.500,00	230.979.472,80
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perleengkapan Lain-lain	0,00	2.150.000,00		2.150.000,00	228.829.472,80
7	20/01/2021		PENYEDIA S ARANA (AS ET TETAP)					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	12.050.000,00	0003/SPP02.2014/2021	12.050.000,00	216.779.472,80
8	20/01/2021		PENYEDIA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.012.500,00	0004/SPP02.2014/2021	1.012.500,00	215.766.972,80
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	116.800,00		116.800,00	215.650.172,80
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/Pelayanan Desa	0,00	1.250.000,00		1.250.000,00	214.400.172,80
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	405.800,00		405.800,00	213.994.372,80

Halaman 1

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- b. Buku Kas Pembantu Pajak yang berisikan penerimaan atau pengeluaran kas
- c. Buku Bank Desa Wonoplintahan 2021 yang berisikan jumlah setor, jumlah bunga bank, jumlah penarikan, jumlah pajak dan biaya administrasi.

Tabel Buku Bank Desa Wonoplintahan Tahun 2021

BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON TAHUN ANGGARAN 2021									
							BULAN : N o v e m b e r 2 0 2 1 NAMA BAN : DPR DELTA ARTHA NO.REK : 201100001623		
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/11/2021	Pindahan Saldo		1.907.203.889,79	0,00	1.835.685.554,00	0,00	0,00	71.518.335,79
2	25/11/2021	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	0336/SPP.02.2014/2021	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	64.518.335,79
3	25/11/2021	PENYELENGGARAAN POSYANDU	0337/SPP.02.2014/2021	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	58.918.335,79
4	25/11/2021	PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA	0338/SPP.02.2014/2021	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	56.418.335,79
5	25/11/2021	PENYEDIA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	0339/SPP.02.2014/2021	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	54.528.335,79
6	30/11/2021	Bunga Bank November 2021	0050/TBP.02.2014/2021	47.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575.356,79
7	01/12/2021	ADD (DAU) Bulan November 2021	0051/TBPO.02.2014/2021	34.658.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.234.143,79
8	01/12/2021	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	0340/SPP.02.2014/2021	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	85.584.143,79
9	01/12/2021	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA	0341/SPP.02.2014/2021	0,00	0,00	24.455.000,00	0,00	0,00	61.129.143,79
Total Transaksi Bulan ini				34.705.808,00	0,00	45.095.000,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Kumulatif				1.941.909.697,79	0,00	1.880.780.554,00	0,00	0,00	61.129.143,79

DUSUN PLINTAHAN, 06 Desember 2021
MUR KEUANGAN DESA WONOPLINTAHAN

JUNAEDLISH

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban

Hasil Penelitian Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa wonoplintahan adalah tahap pertama Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa : Laporan Semester Pertama

dan Laporan Semester kedua. Berikut laporan keuangan semester pertama dan semester kedua desa wonoplintahan tahun 2021 yang berisikan susunan kode rekening dan uraian pelaksanaan APBDesa.

Semester Pertama

PERIODE : SEMESTER I 2021							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.600.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	50,00	6.300.000,00
01.05.	Sub Bidang Perumahan	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
01.05.90.	Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.5.7.	Belanja jasa perpanjangan Ijin Pajak	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.075.580.176,80	0,00	282.042.225,00	282.042.225,00	26,27	793.537.951,80
02.01	Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQM adrasah NonFormal	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.2.91	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	84.862.500,00	0,00	35.050.500,00	35.050.500,00	41,30	49.812.000,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milk/Desa (Obst,asent	8.500.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	67,76	2.740.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	67,76	2.740.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	67,76	2.740.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.500.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	67,76	2.740.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia	42.662.500,00	0,00	15.357.500,00	15.357.500,00	36,00	27.305.000,00
5.2.	Belanja Barang dan jasa	42.662.500,00	0,00	15.357.500,00	15.357.500,00	36,00	27.305.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Daklan/Minum)	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.695.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	30,81	12.935.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	31,31	12.635.000,00

Halaman 1

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021 Semester kedua

PERIODE : SEMESTER II 2021							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.600.000,00	6.300.000,00	5.250.000,00	11.550.000,00	91,67	1.050.000,00
01.05.	Sub Bidang Perumahan	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
01.05.90.	Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.5.7.	Belanja jasa perpanjangan Ijin Pajak	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.075.580.176,80	282.042.225,00	139.013.663,00	421.055.878,00	39,15	654.524.298,80
02.01	Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQM adrasah NonFormal	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.2.91	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	84.862.500,00	35.050.500,00	24.683.000,00	59.733.500,00	70,39	25.129.000,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milk/Desa (Obst,asent	8.500.000,00	5.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	94,24	490.000,00
5.2.	Belanja Barang dan jasa	8.500.000,00	5.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	94,24	490.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	5.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	94,24	490.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.500.000,00	5.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	94,24	490.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia	42.662.500,00	15.357.500,00	15.420.000,00	30.777.500,00	72,14	11.885.000,00
5.2.	Belanja Barang dan jasa	42.662.500,00	15.357.500,00	15.420.000,00	30.777.500,00	72,14	11.885.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.530.000,00	4.530.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	99,34	30.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Daklan/Minum)	4.530.000,00	4.530.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	99,34	30.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.695.000,00	5.760.000,00	1.100.000,00	6.860.000,00	36,69	11.885.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	5.760.000,00	800.000,00	6.560.000,00	35,68	11.885.000,00

Halaman 3

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa wonoplintahan tahun 2021 yang berisikan pendapatan, belanja, pembiayaan.

Tabel Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Wonoplintahan tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber dana: DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 30/11/2021

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	962.093.000,00	800.574.400,00	161.518.600,00
4.2.1	Dana Desa	962.093.000,00	800.574.400,00	161.518.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	962.093.000,00	800.574.400,00	161.518.600,00
5.	BELANJA			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	73.965.000,00	70.004.000,00	3.961.000,00
01.02	Penyediaan Sarana, Prasarana, Penginfirahan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.02.02	Pembelian Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik,	61.665.000,00	58.604.000,00	3.061.000,00
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pejabat/Profil Desa (Dipilih)	61.665.000,00	58.604.000,00	3.061.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.665.000,00	46.604.000,00	61.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	16.515.000,00	16.473.000,00	42.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.215.000,00	4.185.000,00	30.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	28.050.000,00	28.031.000,00	19.000,00
5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
02.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	217.672.500,00	123.684.800,00	93.987.700,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
5.2.2.91	Belanja Jasa Pelaksanaan Pendidikan Desa	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	84.862.500,00	59.773.500,00	25.129.000,00
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.07	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bunil, Lansia, Inesntif)	42.662.500,00	30.777.500,00	11.885.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.662.500,00	30.777.500,00	11.885.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	4.530.000,00	4.500.000,00	30.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang dan Konsumsi (Makan/Minum)	4.530.000,00	4.500.000,00	30.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	18.695.000,00	6.860.000,00	11.835.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	6.560.000,00	11.835.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.647.500,00	2.647.500,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.647.500,00	2.647.500,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	16.790.000,00	16.770.000,00	20.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	16.790.000,00	16.770.000,00	20.000,00
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.300.000,00	18.596.000,00	11.704.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	18.596.000,00	11.704.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	6.850.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	8.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	300.000,00	1.300.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	13.946.000,00	1.304.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	15.250.000,00	13.946.000,00	1.304.000,00
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06	Belanja Barang dan Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan desa wonoplintahan tahun 2021, yang berisikan uraian aset desa, uang kas, piutang desa,

persediaan, kewajiban ekuitas.

Tabel Kekayaan Milik Desa Wonoplintahan Tahun 2021

PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021			
KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	66.356.315,80	235.315.426,80
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	-18.283.721,99	45.419.409,01
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	84.640.037,79	189.896.017,79
1.1.2	Piutang		
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Akkasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-Alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	66.356.315,80	235.315.426,80
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Model Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,0	0,0
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	46.520.000,00	0,0
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	134.230.653,00	0,0
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.540.425,00	0,0
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,0
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,0
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,0
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktivitas Tetap	0,00	0,0
	Jumlah Aset Tetap	343.291.078,00	0,0
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	25.000.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	25.000.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	434.647.393,80	235.315.426,80
2.	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	4.010.354,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.216.818,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.227.172,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.227.172,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	603.606.504,80	235.315.426,80
3.1.2.	Ekuitas SAL	-174.186.283,00	0,00
	Jumlah Ekuitas	429.420.221,80	235.315.426,80
	JUMLAH EKUITAS	429.420.221,80	235.315.426,80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	429.420.221,80	235.315.426,80

SUN PLINTAHAN, 06 Desember 20
KEPALA DESA WONOPLINTAHAN

JOKO SETYANGGONO,ST

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Wonoprintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014. Dari hasil penelitian untuk tahap Pelaporan Pertanggungjawaban sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan dikarenakan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan kesimpulan penelitian peneliti memberika saran agar tidak terjadinya kesalah fahaman antara masyarakat maka dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat diinformasikan secara tertulis dengan lebih detail dan terperinci lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. 2020. Pengertian Akuntansi Sektor Publik, Karakteristik, Tujuan dan Ruang Lingkup. [https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=487#:~:text=Baktiar%20Arif%20dkk%20\(2002%3A3,penafsiran%20atas%20informasi%20keuangan%20tersebut.](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=487#:~:text=Baktiar%20Arif%20dkk%20(2002%3A3,penafsiran%20atas%20informasi%20keuangan%20tersebut.) (Diakses 13 Desember 2021).
- Admin.2018. Definisi Desa Menurut Para Ahli. <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (Diakses 13 Desember 2021)
- Admsykal.2021. Kendala Terhadap Pengelolaan Dana Desa. <https://syakal.iainkediri.ac.id/kendala-terhadap-pengelolaan-dana-desa/>. (Diakses 14 Januari 2022)
- Afdal.2020. 6 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik Dalam Organisasi. <https://www.ladfanidkonsultindo.com/2020/04/19/6-peran-akuntansi-manajemen-sektor-publik-dalam-organisasi/> (diakses 30 Desember 2021).
- AyiSumarna.2015. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.keuangandes.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html?m=1>. (diakses 06 Januari 2022).
- BambangParlupi. 2020. Pengertian Desa, Otonomi dan wewenang. <https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pengertian-desa-otonomi-dan-wewenang.html#gsc.tab=0> (Diakses 13 Desember 2021).
- \
BPKP.2015. Petunjuk Pelaksana Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Deepublist.2020. Pengertian Variabel Penelitian dan Jenis-Jenisnya.

<https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/pengertian-variabel-penelitian/amp/> (diakses 30 Desember 2021).

E-katalog.2016.Kode Rekening. https://sikd.majalengkakab.go.id/e-katalog/kode_rekening.html. (diakses 06 Januari 2022).

Ferina, Ika Sasti, and Herman Lubis. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 14.3 (2016): 321-336.

Humas.2016.Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus. <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/> (diakses 30 Desember 2021).

Indrianasari, Neny Tri. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak* 1.2 (2017): 29-46.

\
JurnalEntrepreneur.Pengertian Akuntansi dan Pentingnya dalam Bisnis. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-pentingnya-dalam-bisnis/> (Diakses 13 Desember 2021).

KSAP.2022.SAP.<http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansipemerintahan/>.(diakses 06Januari2022).

Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5.2 (2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PujiAgus.2015.Pengelolaan Keuangan Desa:Sistem Prosedur Penatausahaan Keuangan Desa. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-penatausahaan-keuangan-desa->

2019-11-05-48737eb7/. (Diakses 06 Januari 2022).

Puspasari, Oktaviani Rita, and Dendi Purnama. Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi* 2.2 (2018): 145-159.

Sululing, Siswadi, Haruni Ode, and Muhammad Gifari Sono. "ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*. Vol. 1. No. 1. 2018.

Suryaden.2015.Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa?amp>. (diakses 06 Januari 2022).

Tumbelaka, Herlen Indrakartika Angela, Inggriani Elim, and Meily Kalalo. Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal* 2.2 (2020): 74-86.

Wikeupedia.2018.Pengelolaan Keuangan Desa. <http://wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desa-perencanaan-detail-404704.html>. (diakses 30 Desember 2021). A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.